

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbankan

2.1.1 Pengertian Perbankan

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan, misalnya untuk tambahan modal. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, mengirimkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, Pajak Bumi dan Bangunan, uang kuliah, gaji, dan pembayaran lainnya.

2.1.2 Jenis – Jenis Bank Menurut Fungsinya.

a) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

b) Bank Sentral

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah

negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan.

c) **Bank Umum**

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*). (Gramedia Blog, n.d.)

2.2 Sistem Pengendalian Internal

2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern merupakan sistem yang diperlukan untuk mengawal kegiatan sebuah perusahaan, dimana perusahaan dapat meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan dalam menilai hasil kinerja perusahaan. Sistem pengendalian intern dapat menghasilkan laporan yang dikehendaki manajemen, dapat mengamankan sumber-sumber dari pemborosan, kecurangan, dan ketidakefisienan, selain itu sistem pengendalian intern juga dapat meningkatkan ketelitian terhadap

data akuntansi , juga mendorong ditaati dan dilaksanakannya kebijakan perusahaan serta meningkatkan efisiensi (Nababan & Muktiadji, 2022).

Pengendalian internal berperan penting dalam mencegah kecurangan. Semakin efektif sistem pengendalian internal suatu organisasi, semakin tinggi kepatuhan pengelola terhadap aturan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisasi risiko kecurangan (Yasmin et al., 2023).

2.2.2 Sistem Pengendalian Internal Menurut COSO

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) (COSO, 2013).

COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) adalah sebuah organisasi yang mengembangkan kerangka kerja untuk pengendalian internal dan manajemen risiko. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan mereka serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) pada tahun 1992 mengeluarkan definisi tentang pengendalian internal. Definisi *COSO* tentang pengendalian intern sebagai berikut: *Internal control is process, affected by entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:*

- a) *Effectiveness and efficiency of operations.*
- b) *Realibilty of Financial Reporting.*
- c) *Compliance with Applicable laws and regulations.*

Dalam bahasa Indonesia, terjemahannya sebagai berikut: sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini:

- a) Efektivitas dan efisiensi operasi.
- b) Keandalan pelaporan keuangan.
- c) Kepetuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Pengendalian Internal

Menurut Romney dan Steinbart (Romney & Steinbart , 2015)

Tujuan Pengendalian Internal sebagai berikut :

- a) Menjamin bahwa aset perusahaan aman dan jauh dari transaksi yang tidak sah.
- b) Memelihara catatan akuntansi guna melaporkan asset Perusahaan secara benar dan akurat.
- c) Memberikan informasi dengan cermat dan dapat diandalkan.
- d) Menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan.
- e) Meningkatkan efisiensi operasional Perusahaan.
- f) Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang sudah ditentukan serta mematuhi peraturan yang berlaku

Sedangkan fungsi dari pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- a) Kontrol preventif guna mencegah munculnya suatu masalah
- b) Kontrol detektif guna menemukan masalah yang sebelumnya gagal dicegah
- c) Kontrol korektif guna mengidentifikasi serta memperbaiki masalah yang timbul

2.2.4 Komponen-komponen pengendalian internal menurut COSO

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) (COSO, 2013).

a) *A control environment* (lingkungan pengendalian).

Merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi.

b) *Risk assessment* (penaksiran resiko).

Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan resiko bisnis dan harus menentukan bagaimana caranya mengelola resiko tersebut.

c) *Control activities* (kegiatan pengendalian).

Untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi resiko tertentu yang dihadapi perusahaan.

d) Information and communication (informasi dan komunikasi).

Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan perusahaan dari atas hingga bawah.

e) Monitoring (pemantauan).

Sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi kekurangan yang signifikan, harus segera dilaporkan kepada manajemen puncak and ke dewan komisaris.

2.3 COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*)

Pengendalian internal COSO framework adalah prosedur yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan untuk memberikan keamanan yang memadai untuk memenuhi tujuan efisiensi dan operasional, keandalan informasi, dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal terdiri dari lima komponen berdasarkan COSO *framework* yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (COSO, 2013).

apa saja yang termasuk dalam masing-masing komponen ini yaitu :

1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*): Menilai bagaimana struktur organisasi, integritas, nilai etika, dan kompetensi karyawan dalam mendukung pengendalian dana pensiun.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*): Mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat keakuratan dan ketepatan penyaluran dana pensiun.
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*): Mengamati kebijakan dan prosedur operasional yang dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan pengendalian pada dana pensiun.
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*): Menganalisis alur komunikasi informasi antara pihak internal dan eksternal bank dalam proses pengendalian internal pada dana pensiun.
5. Pemantauan (*Monitoring*): Mengevaluasi mekanisme pemantauan berkala terhadap sistem dan proses, termasuk input data dan evaluasi terhadap TOOS (*Taspen One Hour Service*) serta proses validasi lapangan.

2.4 Dana Pensiun

2.4.1 Pengertian Dana Pensiun

Seiring dengan berjalannya pembangunan dan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat, kesadaran untuk mencapai suatu kualitas hidup yang lebih baik semakin bertambah. Ini bisa dilihat dari sikap dan tindakan hampir setiap orang yang menginginkan kesejahteraan hidupnya, pada saat masih aktif bekerja maupun pada saat memasuki masa pensiun di usia lanjut. Mereka menginginkan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kelangsungan kesejahteraan mereka disaat sudah tidak bekerja lagi. Maka sebagai kompensasi jasa mereka diadakannya program pensiun sebagai solusi terhadap masalah kesejahteraan ekonomi setiap individu (L & Korompis, 2023)

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan mengelola manfaat pensiun, yang didirikan tersendiri oleh suatu perusahaan untuk menjamin kelangsungan pendapatan seiring bertambahnya usia karyawan (Anggun Dwi Lestari et al, 2025).

Pada prinsipnya dana pensiun merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang biasa dihadapi di masa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia. Resiko tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka, karenanya untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut diciptakan suatu usaha pencegahan antara lain dengan menyelenggarakan program pensiun yang bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah (Ihsan Ahsanul, Hesti Widiyanti, 2022).

Berdasarkan UU No. 11 tahun 1992, di Indonesia terdiri dari 3 jenis dana pensiun:

1. Dana pensiun pemberi kerja

Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

2. Dana pensiun lembaga keuangan

Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Peserta bisa siapa saja baik karyawan ataupun pekerja mandiri / wirausaha (Wikipedia, n.d.).

2.4.2 Sistem Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Dana Pensiun.

Pengendalian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengendalian preventif dimaksudkan untuk mencegah masalah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi, pengendalian detektif untuk menemukan masalah segera setelah masalah tersebut terjadi, pengendalian korektif dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian detektif (Setiono et al., 2017)

Menurut Arens, Elder, dan Beasley. kontrol dalam pengelolaan dana pensiun harus mampu mendeteksi dan mencegah adanya kecurangan seperti pencairan ganda, pencairan kepada penerima tidak sah, atau manipulasi data penerima manfaat. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat menjadi kunci dalam pengelolaan dana pensiun

2.4.3 Peran Sistem Pengendalian Intern dalam Pengelolaan Dana Pensiun.

Sistem pengendalian intern memiliki peran penting dalam pengelolaan dana pensiun, terutama dalam mengurangi risiko kesalahan

dan penyalahgunaan dana. Sistem ini memastikan bahwa prosedur dana pensiun dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, pengendalian intern juga membantu mendeteksi serta mencegah potensi fraud atau manipulasi dalam proses administrasi dana pensiun. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, kepercayaan pensiunan terhadap bank sebagai lembaga pengelola dana dapat terjaga.

a. Keterbatasan Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang bagaimanapun baiknya, tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, karena selalu ada kemungkinan bahwa data yang dihasilkannya tidak akurat akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem tersebut. Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal Mulyadi dan Puradiredja adalah:

- 1). Kesalahan dalam pertimbangan Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin, karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lainnya.
- 2). Gangguan Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan berupa membuat kelalaian, tidak adanya perhatian, atau diperiksanya. Sulit bagi seseorang auditor untuk memberikan penilaian yang obyektif dan independent

apabila ternyata internal audit terlibat dalam kegiatan yang akan diperiksanya. Dari penjelasan tersebut peneliti setuju bahwa independensi itu harus bebas dari pengaruh apapun dan memihak pada hal yang benar.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu yang dijadikan referensi pada penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis sistem pengendalian intern pada dana pensiun bulanan di PT. Bank Mandiri Taspen KC Manado (L & Korompis, 2023).	Wawancara, observasi, dokumentasi	Hasil penelitian mengenai lingkungan pengendalian dana pensiun di PT. Bank Mandiri Taspen KC Manado dapat dilihat bahwa manajemen dan pegawai telah menunjukkan integritas dan nilai-nilai etika yang baik. Begitu juga dengan komitmen dalam bekerja yang sesuai dengan Standard Operating Producer (SOP).
2	Analisis pengendalian intern dan sistem pembayaran dana pensiun bulanan pada pt. Taspen (persero) cabang manado (Setiono et al., 2017).	Wawancara Analisis Data, dan Kesimpulan	Hasil Penelitian Penerapan pengawasan intern atas pembayaran dana pensiun pada PT. Taspen (persero) KC Manado sudah efektif, hal ini dibuktikan dalam penggunaan aplikasi ACB (Aplication Core Bisnis) yang berfungsi untuk melakukan perhitungan, mengolah, mengontrol, serta mendapatkan informasi-informasi dana pensiun dari berbagai mitra bayar berjalan dengan baik.

3	Analisis pengendalian internal sistem penggajian menggunakan pendekatan coso pada cv xyz (Fajarsari & Dini, 2022)	Wawancara, Pengumpulan data, dan Penarikan kesimpulan	Hasil dari penelitian ini adalah Permasalahan mengenai sistem penggajian terjadi di CV XYZ, yaitu sistem pengendalian internal penggajian masih belum terkendali. Upaya preventif dalam proses evaluasi mencegah terjadinya kecurangan dengan mengembangkan sistem pengendalian internal berlandaskan COSO.
4	Analisis sistem pengendalian internal berbasis coso pada pembiayaan di bank negara indonesia syariah (study kasus pada bank negara indonesia kcp indralaya) (Mahdi Hendrich, 2021)	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi, Analisis data	Hasil penelitian ini sistem pengendalian internal pada pembiayaan di Bank BNI Syariah KCP Indralaya sudah cukup baik. Namun ada beberapa unsur-unsur dari Sistem Pengendalian Internal yang masih harus diperbaiki. Misalnya belum adanya khusus petugas Collection sehingga menimbulkan kinerja karyawan tidak begitu maksimal dan tingkat rasio Net Performing Financing yang tinggi.
5	Analisis sistem pengendalian internal coso Atas pembiayaan murabahah bermasalah Tahun 2015 (studi kasus di bank mu'amalah) (Mukaromah, 2022)	Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi	Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar komponen COSO, seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan telah diterapkan dengan baik, namun komponen aktivitas pengendalian belum sepenuhnya sesuai karena masih terdapat ketidakpatuhan terhadap kebijakan, baik dari pihak internal maupun eksternal.